

SKRIPSI
PENGARUH *UN WOMEN* DALAM PENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK PEREMPUAN DI TANZANIA
(Studi Kasus : Wanawake Wanaweza Fase I)

MUNIRAH

E131 15 312



Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

2019



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH *UN WOMEN* DALAM PENINGKATAN
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI TANZANIA (STUDI
KASUS : WANAWAKE WANAWEZA FASE I)

N A M A : MUNIRAH

N I M : E13115312

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 16 Mei 2019

Mengetahui :

Pembimbing I,

Muh. Nasir Badd, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197312051998021001

Pembimbing II,

Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si
NIP. 197101092008012005

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003



HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH *UN WOMEN* DALAM PENINGKATAN
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI TANZANIA (STUDI
KASUS : WANAWAKE WANaweza FASE I)

N A M A : MUNIRAH

N I M : E13115312

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 2 Mei 2019.

TIM EVALUASI

Ketua : Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq. Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si

2. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

3. Bama Andika Putra, S.IP, MIR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Shalawat kepada Rasulullah SAW yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh UN Women dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Tanzania (Studi Kasus: Wanawake Wanaweza Fase I)”** sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam perjalanan hingga skripsi ini selesai di tuliskan, penulis sadar bahwa skripsi ini memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Oleh karena itu penulis berharap adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga kepada orang-orang ini yang telah hadir di kehidupan penulis :

1. Mamah **Gusni Ali Lombeng** dan Ayah **Marzuki Matta Pagessa** yang telah menjadi orangtua hebat bagi penulis. Memberikan dukungan dalam segala bentuk di setiap langkah penulis selama masa perkuliahan hingga ke penyusunan skripsi. Membantu dengan merikan motivasi kepada penulis selama penyelesaian tugas akhir. Dukungan dari ayah dan mamah menyadarkan penulis bahwa jarak dapat mengalahkan rasa cinta;
2. Bapak **Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D** selaku ketua Departemen Hubungan Internasional dan juga Selaku Pembimbing I dan Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si** selaku pembimbing II yang selalu menemani dan membimbing selama berjalannya proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih banyak buat semua arahan dan masukannya;
3. Dosen-dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah membagi ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga selama penulis berada di HI UNHAS : **Pak Patrice, Ibu Seniwati, Kak Aswin, Kak Gego, Pak Bur, Kak Agus, Pak Ishaq, Pak Adi, Kak Jannah, Kak Bama, Kak**



Aca, Pak Munjin, dan Semuanya yang tak sempat penulis sebutkan satu-persatu;

4. Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, yang tersayang **Bunda** dan **Kak Rahma** yang menemani sejak Maba dalam segala urusan administrasi penulis selama 3 Tahun di Kampus dan juga **Kak Tia**.
5. Saudara-saudari penulis kakak **Mukarramah Marzuki**, kakak **Sutrisna Wijaya Said**, dan adik **Ismail Marzuki** yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;
6. **Rianti Monoarfa** yang telah menjadi teman diskusi, makan malam, masak, cerita, bahkan menjadi tempat jasa print dan scan segala bentuk berkas. Menjadi teman *hunting* masjid dan takjil sejak menjadi penduduk pondok putri amalia. Tetap menjadi mahasiswa yang kritis dan tangguh menghadapi ujian-ujian sebagai mahasiswa tingkat akhir. Ditunggu kehadirannya di suatu negara, biarkan penulis yang menjemput Rianti Monoarfa di bandara 😊. Terimakasih juga kepada sahabat sejati Rianti Monoarfa, **Sri Rezeki Monoarfa** yang telah memperkenalkan penulis dengan Rianti. Kisah anak rantau memang selalu menyenangkan;
7. **Rizka Rahmi Indriani** yang telah menjadi teman bersama dalam mewujudkan ide penulis membuat *drama musical*, mengurus berkas proposal, proposal, teman konsultasi skripsi, mengurus berkas ujian meja, meskipun tidak menjadi teman dalam ujian meja namun terimakasih banyak atas kehadirannya di setiap perjalanan penulis selama kuliah dan selama penyusunan skripsi, tetap menjadi perempuan hebat dan sholehah;
8. **Khatibul Umam** dan **Muh. Uznul Fajrin** telah menjadi teman bagi penulis sejak mahasiswa baru sampai saat ini, memperkenalkan penulis kepada dunia debat dan dunia lainnya, teman yang selalu menyampaikan keluh kesahnya terhadap persoalan administrasi. Terimakasih atas segala cerita yang telah kalian berikan semoga kalian semakin bisa melawan rasa malas pada diri kalian;

Nurrizka yang telah menjadi teman sejak FP 3, menjadi teman di setiap kepanitiaan himpunan, menjadi teman kuliner, dan menjadi teman dengan



segudang informasi. Terimakasih atas segala jebakannya, tetap menjadi Rizka tanpa akun *Instagram*;

10. **Moch. Mihram, S. IP** sarjana pertama dari angkatan 15 yang telah menjadi teman “belajar hidup sehat” penulis. Menjadi pelawak hebat di setiap momen dan menjadi “one call away” di beberapa momen. Meskipun terkadang sedikit menyebalkan dan kenyalotan dan kelambatan setiap kali membuat janji, tetapi terimakasih banyak atas segala cerita dan pengalamannya selama ini. Ditunggu rezekinya dari perusahaan tambang;
11. **Arwini Putri Nur** dengan segala kerempongannya. Menjadi salah satu tempat “cerita” selama masa perkuliahan. Menjadi teman *fast respond* di saat penulis mengurus berkas ujian meja. Semoga makin sering nonton konser;
12. **Dita Zhazha Paramitha** atas segala cerita hidupnya, telah menemani penulis mengisi hari-hari di kosan, menjadi tempat cerita berbagai topik, serta menjadi salah satu *server* terbaik. Semoga ilmu tentang nuklirnya tidak akan pernah terlupakan;
13. **Andi Astri Maharani** teman MKU penulis yang sangat pintar yang telah menjadi teman penulis di kala masih menjadi mahasiswa baru hingga semester terakhir. Menjadi teman konsultasi tugas dan sistem kepenulisan;
14. **Rian Nugraha** mahasiswa dari fakultas sebelah yang selalu menyita waktu penulis untuk mendengar keluh kesah menjadi seorang *ministry* organisasi. Menjadi teman baik dalam mendiskusikan *Game of Thrones* dari season 1 hingga *leaked* episode terakhir. Menjadi *the rescue* saat laptop dan file skripsi penulis bermasalah. Semoga cerita cintanya akan berakhir indah seperti di drama-drama korea;
15. **Galuh Nastassja Haris** seseorang yang penulis takut saat perama kali melihat Galuh karena tatapan tajam serta muka sinisnya. Terimakasih kepada Umam yang telah menjebak kami ke menjadi satu geng yang permasalahan Kpop lebih penting daripada tugas organisasi. Sampai pada akhirnya Galuh menjadi sosok teman yang “eh bosan juga yahh ketemu lo mulu”. Tetap menjadi Galuh yang sinis dan hobby mengeluh agar dunia



menjadi lebih baik, semoga karir kita terang benderang seterang kulit idol Kpop;

16. **Ardi** yang menjadi teman pulang pergi kampus sejak mahasiswa baru hingga semester 6 yang menjadi mantan calon teman ujian meja, setidaknya bisa sama-sama duduk di baruga;
17. **Mohammad Nur Fiqri** yang menjadi *teammate* pertama penulis dalam debat dan menjadi teman diskusi beberapa konsep HI, terimakasih atas segala ilmunya;
18. Teman-teman HI UNHAS 2015 (LEGACY) **Henny, Rara, Sartika, Feby, Fia, Lisda, Wulan, Caca, Firdha, April, Amel, Dyah Ayu, Mumtaz, Kak Resty, Fandha, Kak Difa, Resky, Mety, Fila, Mekar, Rida, Anna, Usy, Masykur, Ryanto, Zul, Kak Asrul, Kak Aweks, Kak Khiar, Hari, Wais, Kak Fahmi, Ugha, Cakra**, terimakasih telah menjadi keluarga pertama bagi penulis saat memasuki dunia perkuliahan, terimakasih banyak atas segala moment indah dan ilmunya selama ini;
19. Kakak-kakak penulis, kak **Saraswati** yang telah menjadi teman paling setia dalam menjalankan tugas sebagai LO, menjadi teman cerita, serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Kak **Finka Maureen** my fairy god mother in every moment dengan hati yang sangat tulus dan hangat partner terbaik dalam menyusun laporan keuangan;
20. **UKM DBI UNHAS**, terimakasih telah menjadi tempat belajar sejak 2016 dan telah mempertemukan penulis dengan orang-orang hebat, **Ipe, Haykal, Vira, Adit, Firman, Hans, Titan, Farid, Ismi, Neny, Kak Fajar, Kak Hema, Kak Iccang, Kak Kharji**, serta teman-teman dan senior-senior lainnya;
21. **UNHAS MUN Community** terimakasih telah menjadi tempat bagi penulis dalam mengembangkan diri;
22. **HIMAHI FISIP UNHAS** terimakasih atas ilmu dan kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam acara-acara HIMAHI FISIP UNHAS;
23. Adek-adek **Drama Musical, Saf, Tia, Kiki, Wardah, Egi, Dian, Isa, Dion, Ai, Fadil**, terimakasih telah menerima ide-ide penulis;



24. Teman-teman **KKN UNHAS Gel. 99 Desa Malaka, Arwinni Maharani** teman rumpi dan bermalam di tenda pramuka menjadi seseorang yang selalu meyakinkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, **Aisiah Naim** ukhti ku yang menjadi kembang desa, **Yusniar** si kecil yang penuh dengan kejutan di setiap tidurnya, **Mini the stronger women in the village**, **Jasman** yang selalu request film sebagai pengantar tidur, **Iqra Putra Yusuf** kordes andalan yang selalu melatih kesabaran penulis, terimakasih banyak atas cerita dan pengalaman tinggal bersama selama 40 hari;
25. Kepada pihak-pihak lain yang telah hadir dalam perjalanan hidup penulis yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih;
26. Terakhir, kepada diri ku sendiri, penulis dari skripsi ini **Munirah**, terimakasih banyak telah mengalahkan segala bentuk kemalasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat meskipun air mata harus jatuh setiap malam. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa kerja keras dan keinginan yang kuat dari dalam diri sendiri. **Cheers for your own self!!!!!!!.**

Makassar, 16 Mei 2019

Penulis

Munirah



ABSTRAK

Munirah, E 13115312, “Pengaruh UN Women dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Tanzania (Studi Kasus: Wanawake Wanaweza Fase I)”, dibawah bimbingan Muh. Nasir Badu, selaku pembimbing I, dan Pusparida Syahdan, selaku pembimbing II, pada Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh UN Women dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di Tanzania melalui program Wanawake Wanaweza Fase I dan (2) hambatan program Wanawake Wanaweza Fase I dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di Tanzania. Adapun yang menjadi latar belakang penulis ialah Tanzania merupakan salah satu negara yang meratifikasi CEDAW serta memberikan kursi khusus kepada perempuan di dalam parlemen. Keadaan tersebut kurang di dukung oleh kondisi masyarakat Tanzania yang masih kuat dengan konsep *gender* mengenai pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Sebagai salah satu organisasi yang berfokus terhadap permasalahan perempuan UN Women mengadakan program Wanawake Wanaweza Fase I yang berfokus pada peningkatan partisipasi politik perempuan di Tanzania pada pemilihan umum 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe kualitatif dengan jenis pendekatan kasus, yakni penelitian ini menjelaskan tentang Pengaruh UN Women dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Tanzania (Studi Kasus: Wanawake Wanaweza Fase I). Hasil dari program ini dapat dilihat adanya peningkatan beberapa bentuk partisipasi politik perempuan di Tanzania pada pemilihan umum tahun 2015, namun beberapa bentuk partisipasi politik mengalami penurunan. Permasalahan *gender* masih menjadi hambatan dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di Tanzania pada program Wanawake Wanaweza Fase I yang dibentuk oleh UN Women.

Kata Kunci: Partisipasi Politik Perempuan, UN Women, Wanawake Wanaweza Fase I



ABSTRACT

Munirah, E 13115312, *"The Influence of UN Women in elevating Political Participation of Women in Tanzania (Case Study: Wanawake Wanaweza Phase I)"*, under the guidance of Muh. Nasir Badu, as adviser I, and Pusparida Syahdan, as adviser II, in Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. This thesis aimed for (1) understanding the influence of UN Women associated with the elevation upon political participation of women in Tanzania through the program of Wanawake Wanaweza Phase I and (2) the constraint of the Wanawake Wanaweza Phase I program in elevating women's political participation in Tanzania. The background from which the writer is inspired is that Tanzania was one of the state to ratify CEDAW along with their providing special seats for women in parliament. This situation is not supported by the conditions of the Tanzanian people who are still strong with gender concepts regarding the division of roles between women and men. As an organization that fokuses on women's issues UN Women held the Wanawake Wanaweza Phase I program which fokused on increasing women's political participation in Tanzania in the 2015 general election. Research method utilized within this thesis is quantitative case-approach type, in which this research will be elaborating the influence of the UN Women associated with the evaluation of women political participation in Tanzania (Case study: Wanawake Wanaweza Phase I). The result of this program is that it can be visioned that there is several spectrum, of improvement for women political participation in Tanzania in 2015 general elction, nevertheless some constraint in elevating women political participation in Tanzania through the program of Wanawake Wanaweza Phase I conducted by UN Women.

Keywords: Women's Participation in Politic, UN Women, Wanawake Wanaweza Phase I



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
1. <i>Gender</i>	6
2. Organisasi Internasional.....	11
3. Partisipasi Politik.....	14
E. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Teknik Pengumpulan Data.....	16
3. Jenis Data	16
4. Teknik Analisis Data	17
5. Metode Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. <i>Gender</i>	18
B. Organisasi Internasional	26
C. Partisipasi Politik	34
BAB III GAMBARAN UMUM.....	43
United Nations Women	43
Partisipasi Politik Perempuan di Tanzania.....	52
Wanawake Wanaweza Fase I	69
IV PEMBAHASAN.....	80



A. Pengaruh Program Wanawake Wanaweza Fase I terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Tanzania	80
B. Hambatan program Wanawake Wanaweza Fase I dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Tanzania	102
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114



DAFTAR TABEL

Grafik 3. 1 Alasan Laki-laki tidak memilih Perempuan di dalam Pemilihan Umum	58
Tabel 3. 1 Presentase Tingkat Pendidikan Perempuan dan Laki-laki	61
Tabel 3. 2 Jumlah Perempuan mencalonkan diri dalam pemilihan umum tahun 2010 di Tanzania	64
Tabel 3. 3 Representasi Perempuan dalam House of Representative of Zanzibar	64
Tabel 4. 1 Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2005, 2010, 2015.....	88
Tabel 4. 2 Jumlah Kandidat dan Kandidat Perempuan di tahun 2010 & 2015.....	94
Tabel 4. 3 Jumlah Perempuan dalam kursi pemerintahan di Tanzania pada tahun 2005, 2010, dan 2015.....	95
Tabel 4. 4 Representatif Perempuan di dalam House of Representative Zanzibar	96
Tabel 4. 5 Jumlah Perempuan dalam kursi khusus perempuan dari setiap partai.	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Perempuan hamil dan ibu yang membawa anak mempunyai barisan tersendiri pada saat pemilihan umum 2015 di Tanzania.....	90
Gambar 4. 2 Kondisi kampanye kandidat presiden dan wakil presiden antara laki-laki dan perempuan.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak yang sama, tanpa mempermasalahkan permasalahan *gender*. Hal ini membuat beberapa dekade terakhir keterlibatan perempuan di berbagai bidang mengalami peningkatan. Seperti mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, memiliki ruang untuk melakukan perdagangan, serta berpartisipasi di dalam dunia politik.

Meskipun kini perempuan telah terlibat di berbagai macam bidang serta berbagai macam gerakan, kampanye, perjanjian internasional telah dilakukan untuk mendukung kesetaraan *gender*, deskriminasi masih terjadi dan masih dirasakan oleh perempuan. Fenomena tersebut membuktikan pentingnya kehadiran perempuan di dunia politik. Kehadiran perempuan di politik dapat menjadi ranah bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan dan memperjuangkan kesetaraan *gender*. Perempuan merupakan aktor terpenting untuk mengangkat suara-suara perempuan lainnya dalam politik untuk menciptakan suatu kebijakan yang peduli terhadap perempuan.

Salah satu negara dengan tingkat ketidaksetaraan *gender* yang tinggi ialah Tanzania. Meskipun Tanzania telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada tahun 1985 dan

tahun yang sama Tanzania menjadi salah satu negara Afrika pertama yang memberikan kuota kepada perempuan di parlemen, tetapi pada prakteknya kesetaraan *gender* di Tanzania masih jauh dari kata setara. Hal ini dapat dilihat



dari data yang diluncurkan oleh *Inter-Parliamentary Union* pada tahun 2013 tercatat dari 350 kursi di parlemen, hanya 126 kursi atau 36% yang diduduki oleh perempuan (Ndlovu dan Mutale, 2013, hal 73). Dari 126 kursi, hanya 24 perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen di luar kursi khusus yang diberikan oleh pemerintah. Dari data yang dikeluarkan oleh Tanzania *Center for Democracy* di salah satu wilayah Tanzania, yakni Zanzibar, tercatat hanya ada kenaikan 2% atau setara dengan satu orang dari hasil pemilu tahun 2005 ke pemilu tahun 2010 di dalam *House of Representative Zanzibar* (Tanzania, 2017, hal. 16).

Kehadiran perempuan di kursi parlemen disebabkan oleh kursi khusus yang diberikan oleh pemerintah Tanzania kepada perempuan sebanyak 30% sejak tahun 1985. Namun, dalam laporan pada tahun 2011 mengatakan bahwa sistem pemilihan dan sistem politik di Tanzania meminggirkan perempuan dalam kompetisi antar partai. Anggota parlemen perempuan yang duduk di kursi khusus sering dianggap lebih rendah daripada anggota parlemen lainnya. Mereka berpendapat bahwa sistem kursi khusus telah mengikis daya saing perempuan dalam sistem demokrasi. Selain itu perempuan yang menjadi anggota parlemen telah menduduki kursi parlemen lebih dari dua periode.

Kehadiran perempuan di politik juga dihambat oleh praktik adat serta kebijakan pemerintah Tanzania yang membuat perempuan mengalami deskrimanasi. Praktik adat yang menganggap pekerjaan perempuan hanya menjadi seorang istri dan ibu (Mbilyi, 2013, hal. 371). Praktik adat tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah yang melegalkan usia pernikahan bagi perempuan pada usia 15 tahun dan melarang perempuan untuk melanjutkan



pendidikannya saat mengandung. Selain praktik adat dan juga kebijakan pemerintah dan dominasi laki-laki di perpolitikan, ketidakpercayaan masyarakat Tanzania terhadap perempuan untuk mengeyam pendidikan menjadi salah satu alasan rendahnya partisipasi perempuan di politik (Meena, Rusimbi,etc, 2017, hal.14). Rendahnya partisipasi perempuan di politik, membuat beberapa hak-hak wanita dan ketidaksetaraan *gender* tetap terjadi. Salah satu penyebabnya ialah karena sedikitnya aktor yang menundukung keberadaan perempuan di Tanzania.

United Nations Women yang selanjutnya akan ditulis dengan *UN Women* merupakan organisasi Internasional dibawah oleh PBB yang mengemban tanggung jawab dalam permasalahan kesetaraan *gender* dan juga pemberdayaan perempuan memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan *gender* terkhusus di negara anggota seperti Tanzania. Salah satu permasalahan yang menjadi fokus *UN Women* ialah keterlibatan perempuan di politik yang merupakan bagian dari permasalahan perempuan di Tanzania. Hal tersebut membuat *UN Women* mengadakan kerjasama dengan beberapa instansi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Tanzania yang dikenal dengan nama Wanawake Wanaweza yang memiliki arti *Women Can*.

Wanawake Wanaweza merupakan program yang dibentuk untuk menyempurnakan program *Democratic Empowerment Project* (DEP), program digagas oleh UNDP yang terlebih dahulu telah bekerjasama dengan pemerintah anzibar dan menggandeng *UN Women* serta UNESCO untuk menyempurnakan program tersebut. Wanawake Wanaweza Fase I dibentuk oleh *UN Women* bekerjasama dengan pemerintah Finlandia, USAID, serta



beberapa organisasi local Tanzania. Program yang ditandatangani pada 12 Desember 2014 berjalan pada tahun 2014-2016 berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan di politik. Partisipasi politik yang diartikan tidak hanya ikut andil dalam pemilihan umum tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan pada tingkat nasional maupun local, serta mendukung adopsi reformasi konstitusi, hukum, dan kebijakan untuk mendukung kesetaraan *gender* di Tanzania (Tanzania, 2017, hal. 6).

Program ini mencakup Daratan Tanzania dan Zanzibar yang merupakan pulau bagian dari Tanzania. Sasaran dalam program ini ialah perempuan, pemuda, dan orang-orang disabilitas. Mereka mendapatkan pelatihan menjelang pemilihan umum Tanzania pada tahun 2015. Pelatihan ini dilakukan bersama 22 partai politik di 30 wilayah Tanzania serta media massa (Tanzania, 2017, hal. 11). Hadirnya program ini diharapkan dapat mengakhiri praktek diskriminasi dengan mendorong partisipasi perempuan, baik yang berusia muda maupun perempuan-perempuan disabilitas dalam bidang politik.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

UN Women hadir untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan Tanzania dalam program *Wanawake Wanaweza* Fase I. Penulis akan membatasi penelitian ini pada tahun 2014-2016 sesuai dengan perjanjian program *Wanawake Wanaweza* Fase I. *Wanawake Wanaweza* Fase I berfokus pada actor perempuan secara umum.

Dengan batasan tersebut serta melihat keadaan Tanzania, rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:



1. Bagaimana pengaruh program Wanawake Wanaweza Fase I terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan di Tanzania?
2. Bagaimana kendala dan hambatan program Wanawake Wanaweza Fase I dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Tanzania?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui pengaruh Wanawake Wanaweza Fase I dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Tanzania.
2. Mengetahui hambatan dan kendala Wanawake Wanaweza Fase I dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Tanzania.

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional baik dosen maupun mahasiswa dalam mengkaji isu-isu Ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan dan kerjasama internasional.
2. Sebagai referensi tambahan bagi aktor-aktor baik individu maupun organisasi tentang pengaruh *UN Women* dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Tanzania terkhusus pada program Wanawake Wanaweza Fase I.



D. Kerangka Konseptual

1. *Gender*

Gender dipandang sebagai suatu konsep yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Rokhmansyah, 2016, hal. 1). Menurut UNESCO *gender* mengarah pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh keluarga, masyarakat, dan budaya di sekitar kita.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan jika *gender* mengarah pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. *Gender* tidak lagi menjadi persoalan personal bagi laki-laki maupun perempuan. Faktor fisik dan biologi yang menjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dijadikan sebagai karakteristik untuk menentukan perbedaan peran, fungsi, serta ekspektasi perilaku yang seharusnya melekat pada laki-laki dan perempuan (Alami, 2010). Karakteristik yang hadir dijadikan sebagai penentu pembagian kerja laki-laki dan perempuan. Pemikiran masyarakat telah terkonstruksi jika karakter maskulin yang umumnya menjadi karakter laki-laki mendapat nilai/posisi yang lebih tinggi terhadap karakter feminis yang umumnya menjadi karakter perempuan. Hal ini membuat adanya ketidaksetaraan antar laki-laki dan perempuan.

Konsep *gender* tidak hanya terjadi di masyarakat namun juga terjadi di studi hubungan internasional. Studi hubungan internasional sebagai



studi yang fokus terhadap permasalahan internasional dikritik karena dianggap sebagai *bias gender*. Konsep-konsep dalam hubungan internasional dianggap mencerminkan dan membentuk suatu pandangan dunia yang maskulin. Salah satu kritikan oleh Rebecca Grant dan Kathleen Newland menganggap konsep positivitis dalam hubungan internasional yang tidak memasukkan pandangan dari perempuan sebagai subyek penelitian akan mengkonstruksi teori-teori hubungan internasional sebagai teori dengan “male eyes” serta menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya subyek penelitian (Alami, 2010). Perempuan seperti telah disingkirkan dari teori HI seperti halnya mereka disingkirkan dari panggung politik (Burchill dan Linklater, 1996, hal. 284)

Dalam praktek hubungan internasional terjadi ketimpangan antar laki-laki dan perempuan. Dapat dilihat dari bagaimana pembuatan keputusan luar negeri lebih didominasi oleh *gender* laki-laki yang memiliki karakteristik maskulin sebagai aktor rasional dalam membentuk kepentingan nasional. Seangkan perempuan jarang menjadi bagian dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri dan menyatakan perang (Burchill dan Linklater, 1996, hal. 296). Dominasi laki-laki dalam pembuatan kebijakan luar negeri tanpa adanya keterlibatan perempuan akan berdampak pada kekerasan pada perempuan. Salah satu contoh kasus ialah sebelum konflik Yugoslavia terjadi, kekerasan terhadap perempuan seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan tidak dijadikan sebagai salah satu



kejahatan dalam perang (Burchill dan Linklater, 1996, hal. 298). Negara-negara dan agen-agen internasional menganggap jika penganiayaan perempuan sebagai permasalahan pribadi dan kultural. Hingga akhirnya, Kanada menjadi negara pertama yang memberi suaka terhadap pengungsi perempuan dan tidak ingin berkompromi dengan “kultur” tentang *gender*.

Meskipun konsep *gender* masyarakat internasional mulai mengenyampingkan sisi maskulinitas dan feminitas sebagai karakteristik utama dalam pembagian peran. Tidak bisa dipungkiri jika konsep tersebut masih menjadi adat yang sangat kental di beberapa negara. Tanzania salah satu negara yang masih bertahan dengan pembagian peran berdasarkan sisi maskulinitas dan feminitas.

Praktik adat di Tanzania masih kuat dengan pembagian peran berdasarkan sisi maskulin dan feminis. Nilai yang terbangun di Tanzania lebih menaruh harapan tinggi pada laki-laki sebagai seorang pemimpin, sehingga laki-laki cenderung mendapatkan Pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berkontradiksi dengan apa yang mereka harapkan terhadap perempuan. Masyarakat Tanzania hanya mengharapkan kepada perempuan untuk menjadi istri dan ibu, sehingga mereka memberikan pengetahuan dan pelatihan untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik dengan pengawasan dari ibu dan orang-orang ahli. Masyarakat Tanzania menganggap jika membaca dan menulis merupakan suatu yang menyimpang dalam kehidupan perempuan (Mbilinyi, 2013, hal. 374).



Konsep *gender* hadir untuk mengkarakteristikan peran antara laki-laki dan perempuan. Praktik adat dan pendefinisian mengenai karakter maskulin dan feminis terkadang membuat praktik ketidaksetaraan *gender* terjadi. Salah satu negara yang kuat dengan praktik tersebut ialah Tanzania.

Konsep feminisme tergolong baru dan provokatif dalam teori dan praktek hubungan internasional. Masuknya perempuan ke dalam beberapa bidang yang mengandalkan sisi maskulinitas seperti militer telah melunturkan keistimewaan laki-laki pada sejumlah negara. Perspektif tradisional yang memisahkan pekerjaan berdasarkan karakteristik maskulin dan feminis terhadap laki-laki dan perempuan telah mengalami pergeseran. Hadirnya konsep feminis telah mengancam dasar-dasar ontologis dan epistemologis Hubungan Internasional, salah satu sisi disiplin ilmu yang melindungi laki-laki dan maskulinitas (Burchill dan Linklater, 1996, hal. 282).

Teori feminisme telah lama berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh Rebecca Grant, teori feminis berkembang berdampingan dengan teori HI, yakni pada abad 20 sejak berakhirnya PD I (Burchill dan Linklater, 1996, hal. 283). Teori feminisme mulai berkembang sejak keberhasilan gerakan untuk menuntut hak pilih bagi perempuan di Inggris dan Amerika Serikat.

Feminis hadir untuk merubah konstruksi sosial dalam pembagian peran dan karakteristik antar laki-laki dan perempuan berdasarkan sisi maskulinitas dan feminitas. Karakter tersebut telah membuat



perempuan sulit untuk terlibat dalam pembentukan suatu kebijakan politik luar negeri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kaum feminis dan sarjana HI posmodern mencoba untuk menghapus pandangan umum tentang politik internasional hanya diperuntukkan untuk laki-laki dan tidak untuk perempuan (Burchill dan Linklater, 1996, hal. 282). Keterlibatan perempuan dianggap perlu karena pada dasarnya suara laki-laki sebagai pemangku kebijakan belum mewakili suara perempuan yang dianggap tidak rasional dalam menentukan suatu kebijakan. Feminisme hadir untuk memberi ruang kepada perempuan akibat pembagian peran antar laki-laki dan perempuan yang berdampak pada adanya ketidaksetaraan *gender*.

Terdapat berbagai macam gerakan-gerakan feminisme. Hal tersebut didasari pada gerakan feminisme yang bersifat homogen terkadang tidak bisa menangani permasalahan-permasalahan khusus yang muncul di beberapa kasus feminisme. Namun tujuan mereka tetap sama, yakni menunjukkan keberadaan perempuan di tengah budaya yang menjunjung tinggi keberadaan laki-laki.

Gerakan-gerakan feminisme kini tidak hanya memberi dampak kepada kebijakan internal suatu negara. Gerakan feminisme mulai membuat suatu tindakan yang menunjukkan keberadaan mereka di kancah internasional. Gerakan tersebut membantu perempuan yang berada di negara-negara dengan sistem *patriarki* untuk mulai keluar dari konstruksi masyarakat tentang pembagian peran berdasarkan sisi maskulinitas dan feminitas.



Tanzania sebagai salah satu negara yang masih kuat dengan budaya patriarki kini juga terkena dampak dari gerakan feminisme. Perempuan yang hanya dilihat sebagai seorang istri dan ibu kini mulai terlibat dalam ke berbagai bidang, salah satunya berpartisipasi dalam politik yang dianggap sebagai salah satu peran yang mengandalkan sisi maskulinatas, yakni berpikir rasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi gerakan feminisme dalam mendukung keberadaan perempuan di tengah lingkungan yang masih kuat dengan sistem patriarki.

Dalam permasalahan seperti ini, dibutuhkan suatu badan khusus yang mengikat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu negara. Kehadiran organisasi internasional diharapkan dapat mengikat dan membuat anggota-anggotanya tunduk dalam suatu hukum. Seperti yang dilakukan oleh UN Women terhadap anggota-anggotanya, terkhusus negara-negara yang masih tinggi dengan permasalahan perempuan, salah satunya Tanzania.

2. Organisasi Internasional

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses interaksi sosial tidak dapat dipungkiri adanya kesamaan dan perbedaan visi maupun misi antar individu. Kesamaan visi dan misi antar sesama individu mendorong lahirnya sebuah organisasi.



Lingkaran organisasi tidak hanya berfokus pada individu dan individu. Organisasi juga dapat hadir pada tingkatan keluarga, masyarakat, pemerintah, bahkan negara. Organisasi hadir untuk memudahkan anggota yang terlibat merealisasikan visi dan misi mereka serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Kompleksitas permasalahan dunia dan kesamaan visi misi beberapa negara mendorong terbentuknya organisasi Internasional.

D.W. Bowett mengartikan organisasi internasional sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati Bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda.

Organisasi Internasional dapat disimpulkan sebagai kerjasama antar dua atau lebih aktor yang melampaui batas negaranya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan bidang-bidang lainnya yang diikat oleh suatu ikatan format berupa perjanjian yang disetujui oleh anggota dari organisasi tersebut.

Dilihat dari tujuan suatu organisasi, organisasi Internasional dibagi ke dalam dua bentuk, organisasi umum dan organisasi khusus (Rodee, Christol, etc, 2013, hal. 599). Organisasi Umum ialah organisasi yang



memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi internasional pada umumnya. Tujuan umum yang ingin dicapai oleh organisasi internasional seperti yang tercantum pada pasal 1 piagam PBB yakni mewujudkan keamanan dan perdamaian internasional, membangun relasi yang baik antar bangsa, dan mencapai kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Salah satu contoh organisasi umum ialah PBB. Sedangkan organisasi khusus ialah organisasi yang memiliki tujuan untuk menjadikan organisasi internasional sebagai wadah dalam mewujudkan suatu visi ataupun misi yang menjadi karakteristik dari organisasi tersebut. Salah satu contoh organisasi internasional khusus adalah UN Women.

UN Women sebagai organisasi internasional khusus yang fokus terhadap permasalahan perempuan. Tujuan utama UN Women adalah mendapatkan kesetaraan *gender*. Dalam mewujudkan tujuannya UN Women bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam membentuk suatu hukum, kebijakan, program, dan jasa untuk memastikan tujuan mereka dijalankan dengan baik dan memberi keuntungan kepada perempuan di dunia (UN Women, 2018)

Sebagai salah satu negara anggota, UN Women memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan perempuan yang ada di Tanzania. Salah satu permasalahan bagi perempuan yang juga merupakan poin strategi prioritas bagi UN Women adalah partisipasi politik perempuan dalam suatu negara.



3. Partisipasi Politik

Teori partisipasi politik merupakan teori yang berasal dari ilmu politik, namun pada praktiknya teori ini didukung oleh beberapa ilmu, salah satunya ialah ilmu hubungan internasional. Ilmu Hubungan Internasional yang memiliki fokus pada interaksi antar satu aktor dengan aktor lain lintas negara mengambil peran dalam partisipasi politik suatu negara. Keikutsertaan Ilmu Hubungan Internasional dalam partisipasi politik didasari pada fenomena-fenomena internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara.

Meriam Budiardjo beranggapan jika partisipasi politik memiliki pengertian sebagai kegiatan seseorang ikut serta dalam kehidupan politik secara aktif dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy), kegiatan ini mencakup memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dengan mengadakan hubungan Bersama pejabat pemerintah atau anggota parlemen atau para pemangku kebijakan.

Partisipasi politik dapat digambarkan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses politik. Hal ini mengacu pada keterlibatan warga dalam berbagai proses politik. Warga negara dapat terlibat dalam segala tahapan kebijakan proses politik, mulai dari pembentukan keputusan, penilaian terhadap keputusan, serta ikut serta dalam pelaksanaan keputusan (Miaz, 2012, hal. 20).



Dalam program Wanawake Wanaweza, partisipasi perempuan di politik menjadi fokus permasalahan. Program tersebut ingin perempuan berpartisipasi dalam politik tidak hanya ikut andil sebagai pemilih dalam pemilihan umum, tetapi juga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Perempuan dapat terlibat dalam penyusunan suatu kebijakan, terutama pada kebijakan-kebijakan yang menyangkut pada persoalan perempuan. Dari program ini, diharapkan keikutsertaan perempuan dalam politik dapat menyelesaikan permasalahan ketidaksetaraan *gender* yang menjadi salah satu permasalahan di Tanzania.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah tipe kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian ini maka akan menjelaskan data pemilihan umum tiga tahun terakhir terhadap pengaruh *UN Women* dalam kerjasama Wanawake Wanaweza Fase I dalam meningkatkan partisipasi politik wanita dengan kondisi masyarakat dan kebijakan Tanzania yang masih kuat dengan praktik ketidaksetaraan *gender*.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan terhadap bentuk partisipasi politik. Peneliti berfokus pada bentuk partisipasi politik yang tercantum di dalam *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dengan bentuk partisipasi jumlah pemilihan dalam pemilihan umum dan jumlah perempuan yang berhasil menduduki jabatan pemerintahan dalam pemilihan umum



2015. Peneliti mengenyampingkan proses mobilisasi politik sehingga tidak terdapat penjelasan spesifik mengenai mobilisasi politik.

Tujuan penelitian kuantitatif untuk menggambarkan suatu fenomena berdasarkan pada yang ada di lapangan sebagai bahan kajian untuk dianalisis. Untuk mendukung proses analisis, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggambarkan data empiris dan argumen relevan yang ada di lapangan terhadap suatu fenomena yang menjadi pusat penelitian. Dengan menggunakan tipe tersebut diharapkan peneliti dapat menarik kesimpulan yang relevan dan bersifat analitik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data ialah metode *Library Research*. Data-data didapat melalui buku, jurnal, artikel, serta berbagai media lainnya baik yang berbentuk cetak maupun yang berbentuk *online*.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti ialah data sekunder. Data tersebut didapat dari buku, jurnal ilmiah, artikel, analisis-analisis yang dibuat oleh para ahli, hasil survei, dan situs-situs yang dapat dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan pengaruh *UN Women* dalam meningkatkan partisipasi politik wanita di Tanzania dengan program *Wanawake Wanaweza Fase I*.



4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah Teknik analisis kuantitatif. Dari data-data yang diperoleh, peneliti akan membuat suatu argumen yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap topik penelitian. Jika terdapat data kualitatif dalam proses penelitian, maka data tersebut akan digunakan untuk memperkuat analisis kuantitatif.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan oleh peneliti ialah metode deduktif. Peneliti akan menggambarkan secara umum masalah yang akan diteliti. Kemudian peneliti akan menggambarkan permasalahan secara rinci lalu membuat suatu kesimpulan dari data-data yang di dapat dari hasil penelitian. Penulis akan menggambarkan secara umum keadaan partisipasi politik perempuan di Tanzania dan *UN Women*, kemudian penulis akan merincikan penulisan terhadap pengaruh *UN Women* dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Tanzania dengan program Wanawake Wanaweza Fase I.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Gender*

Tuhan menciptakan perbedaan kelamin/*sex* kepada manusia, laki-laki dan perempuan. Dari perbedaan tersebut sosial menciptakan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah *gender*. *Sex* serta *Gender* membagi manusia ke dalam dua kelompok yakni laki-laki dan perempuan, tetapi terdapat perbedaan konsep antara *gender* dan *sex*.

Sex dan *gender* membagi manusia ke dalam dua kelompok, perempuan dan laki-laki. *Sex* membagi manusia ke dalam dua kelompok berdasarkan sisi biologis termasuk persoalan genetic, anatomi, dan psikolog. Perbedaan ini bersifat natural dan menjadi bawaan sejak manusia lahir ke dunia. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki menurut *sex* tidak dapat diubah kecuali dengan penanganan medis. Perbedaan tersebut mendukung terbentuknya konstruksi sosial tentang pembagian peran antara perempuan dan laki-laki yang dikenal dengan istilah *gender*. *Gender* bersifat tidak natural dan tidak dibawa sejak manusia lahir ke dunia. Kepatenan *gender* dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, mengingat nilai-nilai sosial dan norma bukanlah sesuatu yang bersifat statis.

Berikut definisi *gender* menurut para ahli:

- a. Oakley, gender merupakan perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan;



- b. Caplan, menegaskan bahwa *gender* merupakan perbedaan perilaku antar laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagai besar justru terbentuk dari proses sosial dan *culture*;
- c. Linda L. Lindsey, menganggap bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan termasuk dalam bidang kajian *gender* (*What a given society defines as masculine or feminism is a component of gender*)
- d. H. T. Wilson, mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya menjadi laki-laki dan perempuan
- e. Elaine Showalter, menyebutkan bahwa *gender* lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial-budaya

Gender mengarah pada konstruksi sosial dan kultur tentang perbedaan peran, tanggung jawab, hak khusus, hubungan, dan harapan antara laki-laki dan perempuan (John, 2011, hal. 4). Dari konsep tersebut lahirlah standar yang mendefinisikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Standar yang dilihat dari sisi maskulinitas yang erat kaitannya dengan laki-laki dan sisi feminitas bagi perempuan.

Standar tersebut membuat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan dalam hal kebutuhan, reaksi, dan juga prioritas (John, 2011, hal. 5). Dampak dari perbedaan tersebut membuat adanya ketidaksetaraan



gender atau *gender inequality* antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.

Ketidaksetaraan *gender* atau *gender inequality* adalah perbedaan-perbedaan yang digerakkan oleh system yang tidak adil. Sistem tersebut diperkuat dengan kehadiran Lembaga-Lembaga sosial yang ikut dalam melegalkan system tersebut. Perbedaan jenis kelamin yang berimplikasi terhadap pemisahan karakter antara laki-laki dan perempuan memberikan dampak terhadap perbedaan akses sumber daya (John, 2011, hal. 7).

Ketidaksetaraan tersebut berimplikasi ke berbagai bidang. Perempuan tidak mendapatkan akses untuk mengenyam pendidikan tinggi, kurangnya perlindungan hukum terhadap perempuan, dan tidak ada ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, meskipun hanya ikut serta dalam pemilihan umum.

Isu ketidaksetaraan *gender* telah muncul sejak akhir abad ke-18. Jeremy Bentham seorang filsuf Inggris mempertanyakan tentang hak pilih perempuan, serta mengenai partisipasi perempuan dalam lingkungan legislatif dan eksekutif di system pemerintahan (Dilli, 2015, hal. 1). Bentham beranggapan jika kesetaraan *gender* terhadap perempuan juga perlu ditingkatkan dalam bidang pendidikan tugas-tugas domestik (Chernock, 2009, hal. 144).

Disiplin ilmu hubungan internasional hadir pasca Perang Dunia I yakni pada tahun 1919 (Winarto, 2014, hal. 357). Disiplin ini hadir dengan harapan mampu menghalangi terjadinya perang. Namun disiplin ini mengabaikan kritik-kritik perempuan yang mengorganisir perdamaian, termasuk kritik-kritik



perempuan yang ikut aktif dalam penyelenggaraan konferensi Den Haag tahun 1915 (Winarto, 2014, hal. 357).

Dalam konteks ilmu hubungan internasional, meskipun telah diteorikan mengenai keberadaan perempuan namun peran kaum perempuan diabaikan. Disiplin ilmu hubungan internasional didominasi oleh kaum laki-laki, dan lebih menggambarkan kepentingan serta kecemasan dari sudut pandang laki-laki. Dengan demikian disiplin ini mengkonstruksi pokok persoalan yang membuat kebanyakan orang termasuk hampir semua perempuan tidak tampak hadir dalam isu-isu hubungan internasional (Winarto, 2014, hal. 356). Fokus utama hubungan internasional pada awal kemunculannya berfokus pada pelatihan tentara dan rutinitas militer, kelembagaan yang secara historis hanya untuk laki-laki (Burchill dan Linklater, 1996, hal. 286). Ilmu hubungan internasional lebih berfokus pada politik diplomasi tingkat tinggi (*the high politics of diplomacy*), perang, ilmu tata negara (*statcraft*) yang dianggap sebagai dunianya laki-laki (Winarto, 2014, hal. 356). Dalam hal ini, isu *gender* jarang dipertimbangkan sebagai bagian yang dianggap perlu dan penting untuk kepentingan analisis (Pettman, 2001, hal. 584). Pada prakteknya, banyak kaum perempuan menulis pemikiran mereka mengenai perang dan perdamaian namun kritik-kritik mereka cenderung diabaikan (Winarto, 2014, hal. 357).

Dalam teori politik kaum perempuan juga dipisahkan dari dunia pemikiran dan lebih dikaitkan ke dunia emosi dan nafsu. Konsep tersebut menjadikan perempuan dianggap berbahaya bagi laki-laki. Sisi laki-laki diberikan nilai yang lebih *privilese*, sementara sisi perempuan dianggap tidak ada nilai (Winarto, 2014, hal. 359).



Gender terbentuk dari hubungan-hubungan sosial. Secara parsial representasi hubungan sosial, salah satunya politik global (*world politics*) menampakkan netralitas *gender*. Namun, jika dicermati konsep yang dianggap netral lebih menonjolkan pengalaman dan pengetahuan elite laki-laki (Winarto, 2014, hal. 359).

Gap yang terjadi antara laki-laki dan perempuan mendukung lahirnya sebuah protes dan gerakan yang menuntut hak perempuan. Keadaan yang cenderung mengenyampingkan perempuan membuat feminisme membuat beberapa klaim-klaim strategik yang sangat penting (Winarto, 2014, hal. 359). Pertama, pengalaman perempuan secara sistematis berbeda dengan pengalaman laki-laki. Kedua, semua hubungan sosial dikarakteristikkan *gender*, sehingga perempuan memiliki ruang tersendiri dalam kelas, atau ras dalam bentuk-bentuk balutan *gender* (Winarto, 2014, hal. 359).

Feminisme adalah sebuah gerakan kaum perempuan yang menuntut adanya persamaan hak dan keadilan dengan laki-laki. Persamaan hak yang mereka tuntut ialah hak-hak dasar manusia yang tercantum dalam *Declaration of Human Rights* (Winarto, 2014, hal. 359). Feminis secara jelas mengungkapkan perbedaan antara *sex* dan *gender*, dimana *sex* (jenis kelamin) bersifat biologis dan anatomi secara genetik, sedangkan *gender* mengarah pada identitas sosial yang ditentukan oleh peraturan (Sterling, 2006, hal. 245).

Awal kemunculan feminisme untuk mengakhiri masa-masa pemasangan terhadap perempuan (feminis). Sejarah dunia mencatat jika perempuan dirugikan dan selalu dinomorduakan oleh kaum laki-laki (maskulin) dalam



bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik, terkhusus pada masyarakat yang bersifat patriarki (Winarto, 2014, hal 360). Dari latar belakang tersebutlah gerakan feminisme lahir untuk menaikkan derajat kaum perempuan.

Kehadiran Feminisme dapat dikatakan sudah ada sejak lama. Feminisme diperkirakan muncul pada era pencerahan yakni pada abad ke-18 di Eropa dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Pada masa tersebut, terjadi dua revolusi bersejarah, yakni revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi tersebut melahirkan "The American Bil of Rights" yang berisi hak-hak kepada individu berdampingan dengan seruan Perancis "Liberte, Fraternite, Egalite" (kemerdekaan, persaudaraan, kesamaan), hal tersebut memberi pengaruh kuat pada setiap individu (Winarto, 2014, hal. 360).

Pasca deklarasi Hak-Hak Manusia, pada tahun 1789 di Perancis Olympe de Gouge diterbitkan "Declaration of the Rights of Women" (Winarto, 2014, hal. 360). Di tahun 1792 Mary Wollstonecraft membuat karya tulis dengan judul *Vindication of the Rights of Women*, dalam tulisan tersebut berisi prinsip-prinsip dasar feminisme bahwa perempuan harus diberi hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, dan dibebaskan dari ketergantungan ekonomi, maka separuh dari sumber daya manusia dunia akan dibebaskan dan kesempurnaan manusia akan lebih dekat (Smith, 2000, hal. 54).

Pada tahun 1869 John Stuart Mill menulis sebuah esai dengan judul "The Subjection of Women". Tulisan tersebut memberi pengaruh yang besar terhadap pergerakan feminisme di Amerika Serikat. Tulisan tersebut mengatakan jika



anggapan perempuan lebih buruk daripada laki-laki merupakan anggapan yang dibangun atas budaya patriarki. Jika pada kenyataannya perempuan lebih buruk daripada laki-laki dalam segala bidang namun hal tersebut bukan menjadi suatu batasan bagi perempuan dalam melakukan sesuatu, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melarang perempuan terlibat dalam berbagai bidang (Azis, 2007, hal. 55).

Kehadiran feminisme dapat dikatakan sudah cukup lama, namun pergerakan feminisme mulai berkembang dengan pesat pasca berakhirnya PD I berdampingan dengan perkembangan teori HI (Burchill dan Linklater, 1996, hal. 283). Titik balik isu perempuan dalam studi ilmu Hubungan Internasional sejak keluarnya kritikan oleh Cynthia Enloe dengan judul “Di mana kaum perempuan?” (Winarto, 2014, hal. 357). Cynthia Enloe menyampaikan secara tersirat jika kekuasaan itu merupakan suatu fenomena kekuatan sosial yang kompleks yang menciptakan pola dan mereproduksi identitas pribadi dan seksual atas laki-laki, perempuan, dan warga negara nasional (Burchill, 1996, hal. 313). Dalam tulisannya Cynthia Enloe menyinggung persoalan perang yang pada umumnya dikaitkan dengan *gender*. Warga negara dengan *gender* laki-laki dianggap sebagai warga negara dengan tanggung jawab publik seperti menjadi pemimpin, pemangku kebijakan, dan persoalan perang, sementara kaum perempuan lebih dimasukkan ke dalam keluarga, sebuah dunia rumah tangga, atau dikenal dengan istilah pekerjaan domestik (Winarto, 2014, hal.

58).

Pergerakan feminisme memberikan sumbangan tersendiri dalam teori politik internasional. Pada tahun 1990-an dalam konferensi-konferensi



profesional mengenai kurikulum ajar, feminisme dijadikan sebagai sub topik bahasan dalam Hubungan Internasional (Burchill dan Linklater, 1996, hal. 284). Penambahan kurikulum tersebut didasari pada kritikan oleh para pemikir feminis yang menganggap jika Hubungan Internasional merupakan disiplin ilmu yang *biased gender*.

Konsep-konsep dalam Ilmu Hubungan Internasional dianggap mencerminkan dan membentuk suatu pandangan dunia yang maskulin. Salah satu pemikir Feminism Ilmu Hubungan Internasional Rebecca Grant dan Kathleen Newland menganggap konsep positivist dalam Hubungan Internasional tidak memasukkan pandangan dari sisi perempuan, perempuan tidak dijadikan sebagai subyek penelitian dalam mengkonstruksi teori-teori Hubungan Internasional. Teori-teori yang terkonstruksi dalam teori Hubungan Internasional umumnya merupakan teori yang berasal dari *male eyes* / sudut pandang laki-laki serta menampilkan laki-laki sebagai satu-satunya obyek penelitian (Alami, 2010). Perempuan seperti telah disingkirkan dari teori HI seperti halnya mereka disingkirkan dari panggung politik (Burchill Linklater, 1996, hal. 284).

Kaum feminisme dan sarjana Hubungan Internasional posmodern mencoba untuk menghapus pandangan umum tentang politik internasional hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki dan tidak untuk perempuan (Burchill dan Linklater, 1996, hal. 282). Keterlibatan perempuan dianggap perlu karena pada dasarnya suara laki-laki sebagai pemangku kebijakan belum mewakili suara perempuan. Feminisme hadir untuk memberi ruang kepada perempuan akibat



pembagian peran antar laki-laki dan perempuan yang berdampak pada adanya ketidaksetaraan *gender*.

Perkembangan gerakan feminisme semakin berkembang dari masa ke masa, hal tersebut memunculkan banyak aliran feminisme sesuai dengan latar belakang dan tujuan dalam membela hak-hak perempuan (Winarto, 2014, hal. 361). Hadirnya berbagai macam gerakan feminisme didasari pada gerakan feminisme yang bersifat homogen yang terkadang tidak dapat menangani permasalahan-permasalahan khusus yang muncul di beberapa kasus feminisme. Namun tujuan dari gerakan tersebut tetap untuk menunjukkan keberadaan perempuan di tengah budaya yang menjunjung tinggi keberadaan laki-laki.

Konsep *gender* yang membagi peran antara laki-laki dan perempuan berdampak pada terjadinya ketidaksetaraan *gender*. Berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak sejak abad ke-18 dapat disimpulkan jika permasalahan *gender* bukan lagi permasalahan personal suatu negara, namun kini menjadi permasalahan global. Berbagai upaya dilakukan seperti kerjasama internasional, pembentukan suatu organisasi internasional yang berfokus pada permasalahan perempuan, dan berbagai negosiasi dilakukan untuk merealisasikan kesetaraan *gender* antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan *gender* dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

B. Organisasi Internasional

Manusia lahir di dunia sebagai makhluk sosial. Sifat tersebut membuat manusia menjalankan hidupnya dengan melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses interaksi sosial tidak dapat



dipungkiri adanya persamaan dan perbedaan visi maupun misi antar individu. Persamaan visi dan misi antar sesama individu mendorong lahirnya sebuah organisasi.

Organisasi tidak hanya terjalin dalam lingkaran individu antar individu, Organisasi dapat hadir di berbagai lingkaran seperti keluarga, masyarakat, pemerintah, bahkan negara. Organisasi hadir untuk memudahkan anggotanya merealisasikan visi dan misi mereka serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Kompleksitas permasalahan dunia dan kesamaan visi misi beberapa negara mendorong terbentuknya organisasi internasional.

Para ahli mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut:

- a. D.W. Bowett: Organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antar pemerintah dengan pemerintah mauoun antar sesama kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda.
- b. Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr.: Organisasi internasional ialah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang



memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staff secara berkala.

- c. Jack C Plano & Roy Olton: Organisasi Internasional dapat diartikan sebagai suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama di antara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, dan sosial, serta bidang lainnya.

Organisasi internasional pertama kali hadir didasari pada perjanjian antar negara yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan-permasalahan umum yang dirasakan oleh negara-negara. Isu-isu yang dibicarakan di awal kemunculan organisasi internasional merupakan isu-isu yang bersifat ekonomi dan teknis seperti membuat aturan yang jelas untuk navigasi di Sungai Rhine, mengirim pesan internasional, serta mengelola perikanan (Barkin, 2006, hal. 5).

Pasca Perang Dunia I (1914-1918) lahir sebuah organisasi baru yang memiliki kewenangan dan pembahasan lebih luas dari organisasi-organisasi sebelumnya. Organisasi tersebut dikenal dengan *League of Nations*/Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Kehadiran LBB bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian, serta menghindari terulangnya keseraman perang dunia (Barkin, 2006, hal. 5).

Kehadiran LBB tidak berlangsung lama. LBB bubar saat pecahnya PD II. Organisasi tersebut dianggap menjalankan tugasnya dalam mencegah lahirnya PD II. LBB digantikan oleh suatu organisasi yang lebih ambisius dengan nama *United Nations*/Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Tujuan utama PBB seperti



apa yang dicantumkan dalam piagam PBB, yakni menangani masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional yang telah gagal dilakukan oleh PBB (United Nations, 2016).

Pasca terbentuknya PBB, organisasi internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data dari *Union of International Association* di awal tahun 1980-an tercatat 1000 organisasi internasional, dan di awal abad ke-21 tercatat lebih dari 5000 organisasi internasional (Barkin, 2006, hal. 6). Beberapa organisasi internasional merupakan organisasi yang dibawah oleh PBB untuk membahas isu-isu internasional seperti isu perempuan, lingkungan, hingga isu pengungsi.

Terdapat dua pendekatan umum dalam Organisasi Internasional (OI), yakni pendekatan rezim dan pendekatan kelembagaan. Regime yang digunakan dalam konteks ini mengarah pada efek yang ditimbulkan oleh OI terhadap aktor lainnya terutama negara. Pendekatan dalam rezim lebih berfokus pada dampak apa yang diberikan kepada aktor, sedangkan pendekatan kelembagaan lebih berfokus pada apa yang terjadi dalam suatu organisasi internasional dibandingkan dampak apa yang dirasakan oleh aktor (Barkin, 2006, hal. 27).

Dalam pendekatan kelembagaan yang menjadi dasar analisis ialah analisis formal kelembagaan/*formal institutional analysis*. Analisis tersebut mengarah pada stuktur formal organisasi dan birokrasi OI. Piagam organisasi mendasari terbentuknya perjanjian internasional yang mendeskripsikan mekanisme, birokrasi, dan struktur suatu OI. Piagam organisasi menjadi dasar dalam analisis formal kelembagaan (Barkin, 2006, hal. 28).



Setiap organisasi internasional memiliki perbedaan komponen, struktur, dan birokrasi. Perbedaan tersebut didasari pada latar belakang yang berbeda dalam pembentukan suatu OI. Untuk mempermudah proses kerja organisasi, OI memiliki sekretariat dijadikan sebagai organ pusat administrasi organisasi. Beberapa OI memilih untuk menggandeng sekretariat organisasi yang lebih besar untuk mengefesiesikan kerja suatu organisasi. Sebagai salah satu contoh United Nations Environment Programme (UNEP) yang menyediakan fungsi sekretariat untuk kurang lebih sepuluh perjanjian organisasi seperti Protokol Montreal tentang Zat yang Menguras Lapisan Ozon hingga Konvensi tentang Spesies Migrasi Hewan Liar (Barkin, 2006, hal. 29).

Salah satu fungsi administrasi yang dapat ditemukan di sekretariat organisasi ialah implementasi langsung. Organisasi-organisasi internasional yang berfokus pada isu pembangunan dan kemanusiaan memiliki karyawan di negara-negara anggota untuk membantu pemerintah atau melakukan kegiatan yang mendukung program kerja pemerintah. Dalam praktiknya tidak semua OI yang menangani isu kemanusiaan melakukan implementasi langsung. Umumnya mereka melakukan subkontrak dan kerjasama dengan LSM lokal dalam mengimplementasikan program kerja (Barkin, 2006, hal. 29).

Beberapa OI menjadikan implementasi langsung sebagai fokus utama tetapi tidak menjadi fungsi utama. Salah satu bentuk implementasi dalam menjalankan fungsi organisasi ialah dengan mengimplementasikan proyek-proyek spesifik di negara-negara anggota, seperti yang dilakukan oleh NICEF, UNDP, dan UN Women dengan menyokong wakil-wakil organisasi



di berbagai negara dan memberi dana hibah kepada pemerintah dan LSM (Barkin, 2006, hal. 31).

Dalam dokumen OI dijelaskan mengenai mekanisme atau aturan-aturan pendanaan organisasi. Umumnya sumber dana OI berasal dari negara-negara anggota. Terdapat iuran tetap setiap negara sebagai mekanisme sumber pendanaan OI. Namun, OI kadang menggunakan mekanisme negara yang kaya akan memberikan sumbangan lebih besar. Sebagai salah satu contoh ialah struktur iuran PBB yang didasarkan pada konsep kemampuan membayar. Amerika Serikat sebagai salah satu negara kaya membayar 22 persen dari anggaran dasar PBB, dan beberapa negara kecil dan miskin membayar iuran minimum 0,001 persen (Laurenti, 2001, hal. 18).

Sebagian besar organisasi menetapkan struktur iuran sesuai dengan struktur iuran PBB, namun tidak semua sumber pendanaan OI berasal dari iuran-iuran negara anggota. Umumnya OI mengumpulkan dana, baik dana sukarela dari negara-negara anggota maupun sumbangan pribadi dari individu-individu. Beberapa organisasi bergantung pada aliran donasi tetap untuk mempertahankan program mereka. Sebagai contoh, UNICEF yang menjalankan tiga puluh tujuh komite nasional yang masing-masing terdaftar sebagai LSM untuk mengumpulkan dana. Komite-komite nasional ini menyumbangkan sepertiga dari anggaran tahunan UNICEF lebih dari \$1 Miliar (UNICEF, 2001, hal. 33).



Analisis kelembagaan adalah analisis yang digunakan dalam mempelajari fenomena OI pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada tahun 1980-an

berkembang suatu pendekatan untuk menganalisis fenomena OI, yakni analisis rezim. Perbedaan utama antara analisis rezim dan kelembagaan terletak pada perbedaan aktor yang dianalisis. Analisis kelembagaan memandang OI sebagai aktor, sedangkan analisis rezim memandang aktor-aktor lain terutama negara sebagai sumber dalam suatu hasil pada politik internasional. Melihat dampak pada prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang terkait dengan OI terhadap harapan dan perilaku negara. Kelembagaan mempelajari OI dengan melihat apa yang terjadi dalam organisasi, sedangkan rezim mempelajari OI dengan melihat perilaku negara dan efek dari norma dan aturan yang diwujudkan oleh suatu organisasi (Barkin, 2006, hal. 36).

Analisis rezim hadir sebagai akibat dari keterbatasan analisis kelembagaan dalam menganalisis OI. Salah satu keterbatasan analisis kelembagaan ialah ketidakmampuan untuk mengatasi gambaran yang lebih besar terhadap efek OI pada pola perilaku dalam hubungan internasional yang lebih luas. Analisis rezim hadir untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai OI, salah satunya tentang seberapa efektif OI tersebut. Namun, pemahaman yang luas tentang peran OI dalam hubungan internasional membutuhkan dua pendekatan tersebut, pendekatan kelembagaan tentang bagaimana OI bekerja dan pendekatan rezim tentang efek pada aktor lain dalam politik internasional (Barkin, 2006, hal. 37).

Kehadiran organisasi internasional tidak berfokus pada negara. Seiring perkembangannya terdapat berbagai macam organisasi internasional yang tidak menjadikan aktor negara sebagai anggota dari organisasi tersebut. Pada tahun 1945 PBB membagi organisasi internasional ke dalam dua bentuk yakni



Intergovernmental Organization (IGO) dan *International Private Organization* yang juga dikenal dengan nama *Non-Government Organization (NGO)* (Bromideh, 2011, hal. 197).

Menurut *Union of International Associations (UIA)*, IGO adalah organisasi yang terdiri dari negara-negara berdaulat, atau organisasi antar pemerintah. IGO dibentuk oleh perjanjian yang bertindak sebagai *charter/piagam* organisasi (Erturk, 2015, hal. 333). Umumnya isu-isu yang diangkat oleh IGO merupakan isu umum global. Salah satu contoh IGO ialah PBB, UNESCO, UNICEF, dsb.

Organisasi Internasional memelopori pembentukan dan pemeliharaan aturan serta prinsip internasional. Aturan serta prinsip tersebut merupakan harapan dari perilaku masyarakat internasional terutama negara anggota dari organisasi tersebut. Hal tersebut dikenal dengan nama rezim internasional.

Organisasi internasional memiliki beberapa peranan. Berikut peranan dari organisasi internasional (Mingst dan Arreguin-Toft, 2019):

1. Beberapa IGO menetapkan proses pengumpulan informasi, analisis, dan pengawasan yang diatur;
2. Beberapa OGI seperti *World Trade Organization (WTO)* memiliki peranan dalam mengembangkan prosedur dalam pembuatan aturan, menyelesaikan perselisihan, dan menghukum negara-negara yang dianggap gagal dalam mengikuti regulasi yang ada;
3. Peranan dalam melakukan kegiatan operasional dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah substantif utama;



4. Memainkan peran kunci dalam perundingan yang berfungsi sebagai arena negosiasi dan pengembangan koalisi.

Sebagai organisasi swasta atau *private*, NGO memiliki berbagai macam keberagaman. Keanggotaan dari NGO ialah individu atau asosiasi-asosiasi *private* yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Jenis dan struktur NGO sangat bervariasi. Pada dasarnya terdapat tiga jenis NGO yakni organisasi *grass roots*, organisasi pendukung, dan organisasi perantara (Bromideh, 2011, hal. 197-198). Isu-isu yang diambil oleh NGO merupakan isu-isu yang mengglobal dan tidak dapat diselesaikan oleh negara dan solusinya memerlukan kerja sama transnasional.

C. Partisipasi Politik

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, manusia cenderung dihadapkan dengan berbagai pilihan. Hal tersebut juga terjadi pada kehidupan masyarakat dalam suatu negara yang dihadapkan pada suatu pilihan, baik itu pada skala kecil yakni yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, maupun yang berskala besar yakni ikut andil dalam pemilihan yang berkaitan dengan negara. Hal tersebut menuntun masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk berpartisipasi dalam kegiatan politik atau yang dikenal dengan nama partisipasi politik.

Partisipasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *pars* yang berarti bagian dan *participare* (*sipasi*), yang memiliki arti mengambil. Dalam bahasa Inggris partisipasi berarti *participate* atau *participation* yang berarti mengambil bagian atau mengambil peran. Partisipasi dapat diartikan sebagai mengambil bagian atau



mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara (Suharno, 2014, hal. 23).

Para ahli mendefinisikan partisipasi politik sebagai berikut:

- a. Meriam Budiarjo, partisipasi politik memiliki pengertian sebagai kegiatan seseorang ikut serta dalam kehidupan politik secara aktif dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy).
- b. Michael Rush dan Philip Althoft, partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam system politik.
- c. Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
- d. Huntington dan Nelson, partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi politik dapat disimpulkan sebagai bagian terpenting dalam kehidupan suatu negara. Bagi negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator terpenting dalam suatu negara. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi bila pemerintah memberi kesempatan

kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Partisipasi politik tidak bisa berjalan jika hanya negara yang memberi ruang kepada



masyarakatnya, masyarakat juga harus aktif terlibat dalam partisipasi politik (Suharno, 2014, hal. 23).

Menurut Miriam Budiardjo batasan partisipasi politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang ikut secara aktif dalam kehidupan perpolitikan, seperti ikut andil dalam pemilihan pemimpin negara, mempengaruhi kebijakan negara, dan berbagai kegiatan lainnya. Batasan menurut Miriam Budiardjo ini dianggap masih terlalu luas dan tidak memberi batasan yang ketat. Penjelasan Mochtar Mas' oed dan Collin Mac Andrews serta Rush Althoff memperjelas batasan partisipasi politik dengan memasukkan orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintahan sebagai batasan partisipasi politik (Suharno, 2014, hal. 25).

Partisipasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi kegiatan, partisipasi politik dibagi ke dalam dua bentuk, partisipasi politik aktif dan pasif. Partisipasi politik aktif berupa kegiatan yang mengusulkan suatu kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan, memberikan kritik dan saran kepada kebijakan pemerintah, serta ikut dalam memilih pemimpin pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif hanya mentaati peraturan, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah (Sastroatmodjo, 1995, hal. 62).

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi, Robert Lane menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu, yakni (Suharno, 2014, hal. 28):

1. Sebagai saran untuk mengejar kebutuhan ekonomis;



2. Sebagai saran untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial;
3. Sebagai saran untuk mengejar nilai-nilai khusus;
4. Sebagai saran untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Kehadiran partisipasi politik tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Weimar menyatakan paling tidak ada lima faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yakni (Suharno, 2014, hal. 29-30):

1. Modernisasi. Modernisasi di segala bidang memberikan dampak pada komersialisasi pertanian, industriliasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi. Peningkatan tersebut berdampak pada meningkatnya prtisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik.
2. Terjadinya perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas di era industrialisasi. Kemunculan mereka bersamaan dengan tuntutan-tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme mengakibatkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah masyarakat untuk ikut andil dalam proses partisipasi politik.



4. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan seringkali menggunakan cara untuk mencapai kemenangan dengan mencari dukungan massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan.
5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Melusnya ruang lingkup aktivitas pemerintah seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi perbuatan keputusan politik.

Kelompok-kelompok dan individu-individu di dalam satu masyarakat yang sedang berkembang tidak menilai partisipasi politik sebagai tujuan untuk dirinya sendiri, keterlibatan mereka dalam partisipasi politik cenderung menggunakan cara-cara untuk memperbaiki status sosial dan kesejahteraan materi mereka. Dalam proses partisipasi politik tidak dipungkiri tercapainya berbagai macam tujuan. Hal tersebut yang membuat partisipasi politik tidak fokus terhadap kebutuhan individu, tetapi fokus terhadap kebutuhan kelompok (Suharno, 2014, hal. 34)

Pada hakikatnya partisipasi politik tidak memberikan batasan terhadap permasalahan *gender*. Baik laki-laki maupun perempuan dapat mengambil peran dalam partisipasi politik. Pada kenyataannya, di beberapa tempat di dunia perempuan terkadang diperlakukan berbeda dan tidak adil hanya karena permasalahan *gender*, meskipun terdapat kesamaan hak atas partisipasi politik antara laki-laki dan perempuan. Sebagai hasil dari deskriminasi tersebut



perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak dapat ikut berpartisipasi di dalam politik, serta berbagai bentuk deskriminasi lainnya (UNICEF, 2011, hal. 4).

Dengan latar belakang untuk mengakhiri deskriminasi perempuan, PBB mensahkan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada tanggal 18 Desember 1979. Pada tahun 2010, 186 negara telah meratifikasi CEDAW. Suatu negara yang telah meratifikasi CEDAW maka mereka telah mengakui hak-hak perempuan dan akan melakukan segala bentuk kebijakan untuk mendukung keberadaan perempuan termasuk membuat suatu kebijakan hukum di negaranya. Dapat disimpulkan, negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW mempunyai tugas untuk menyelesaikan permasalahan deskriminasi terhadap perempuan di negaranya (UNICEF, 2011, hal. 4).

Dalam Bab II Pasal 7, CEDAW menyatakan jika suatu negara perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapus praktek diskriminasi terhadap perempuan di dalam kehidupan politik dan publik, sehingga perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Hak-hak tersebut meliputi (United Nations, 1981, hal. 3):

- a. Hak untuk memilih, mengutarakan pendapat, serta hak agar mampu mengikuti semua bentuk pemilihan secara publik;
- b. Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintahan dan implementasi serta memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik di semua tingkat di pemerintahan;



- c. Hak untuk berpartisipasi di dalam organisasi non pemerintah dan asosiasi yang berfokus pada permasalahan kehidupan politik dan publik di suatu negara.

Kehadiran perempuan di bidang politik dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Kehadiran perempuan di partisipasi politik tidak semudah dengan kehadiran laki-laki. Banyak faktor yang menjadi hambatan dan mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan. Nadezhda Shvedova membagi hambatan-hambatan tersebut ke dalam tiga faktor yakni faktor ekonomi, faktor sosial dan ekonomi, serta rintangan ideologi dan psikolog.

1. Faktor Politik

Untuk mencapai keseimbangan *gender* dalam politik, suatu negara perlu membuat sebuah komitmen dengan membentuk suatu konstitusi serta kebijakan nasional yang mendukung keberadaan perempuan di politik. Meskipun beberapa negara telah mengimplementasikan sebuah konstitusi dan kebijakan nasional, namun penelitian menunjukkan bahwa struktur politik dapat memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi politik perempuan. Terdapat beberapa hambatan politik yang dihadapi perempuan, berikut ciri-ciri hambatan perempuan dalam politik (Shvedova, 2005, hal. 35):

- a. “Model Maskulin” dalam kehidupan politik dan pemerintah;
- b. Kurangnya dukungan partai, seperti dukungan keuangan yang terbatas untuk kandidat perempuan, akses terbatas ke



jaringan politik, dan standar dan kualifikasi yang lebih ketat diterapkan pada perempuan;

- c. Kurangnya kerjasama dengan organisasi publik lainnya seperti serikat buruh dan kelompok perempuan;
- d. Kurangnya akses perempuan dalam peningkatan edukasi dan pelatihan kepemimpinan, dan mengorientasi perempuan terhadap permasalahan politik;
- e. Sifat pemilihan umum yang mungkin atau tidak mungkin menguntungkan bagi perempuan.

2. Faktor Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam partisipasi politik perempuan. Status sosial dan ekonomi perempuan dalam masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap partisipasi perempuan di dalam lembaga-lembaga politik. Menurut beberapa peneliti, kondisi sosial ekonomi menempati posisi kedua dalam sistem pemilihan dalam merekrut perempuan di dalam politik. Namun dalam prosesnya permasalahan ekonomi dan sosial dapat menjadi kendala utama perempuan berpartisipasi di dalam politik, seperti permasalahan:

- a. Buta huruf dan akses terbatas ke pendidikan dan pilihan profesi;
- b. Beban ganda tugas domestik dan kewajiban sebagai perempuan.

3. Faktor Rintangan Ideologi dan Psikolog



Rintangan ideologi dan psikologis perempuan dalam memasuki dunia politik meliputi hal-hal berikut:

- a. Ideologi *gender*, pola budaya, dan peran sosial yang telah ditentukan dan ditugaskan untuk perempuan dan laki-laki;
- b. Kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum;
- c. Persepsi perempuan tentang politik sebagai permainan “kotor”;
- d. Cara perempuan digambarkan di dalam media massa.

